H.A.R. TILAAR

MENGEMBANGKAN ILMU PENDIDIKAN BERDIMENSI GLOBAL DI INDONESIA

Disampaikan dalam
SEMINAR INTERNASIONAL
DAN TEMU ILMIAH FIP/JIP se- INDONESIA
Manado, 21 Agustus 2007

Diterbitkan oleh:

LEMBAGA MANAJEMEN
Universitas Negeri Jakarta

MENGEMBANGKAN
ILMU PENDIDIKAN BERDIMENSI GLOBAL
DI INDONESIA

(Developing Pedagogy with Global Dimension in Indonesia)

Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed.

Gurubesar Emeritus Universitas Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

Abstract 1

Pendahuluan 1

I. Hakekat Ilmu Pendidikan 4

II. Pandangan-pandangan Baru dalam Ilmu Pendidikan 7

III. Pedagogik Kritis dan Modernisme 15

IV. Ilmu Pendidikan di Indonesia Dewasa ini 20

V. Mengembangkan Ilmu Pendidikan di Indonesia yang Berdimensi Global 24

VI. Harapan di Masa Depan 29

Referensi 31

Lampiran: Ironi Pendidikan dari Trunyan (Doni Koesoema A.) 33

MENGEMBANGKAN ILMU PENDIDIKAN BERDIMENSI GLOBAL DI INDONESIA

Abstract

DEVELOPING PEDAGOGY WITH GLOBAL DIMENSION IN INDONESIA

Pedagogy in Indonesia today is a remnant of postcolonial thinking with the trends borrowing its concept mostly from the West. Whereas the subject of education process is the "Indonesian child" with its specific biological and psychological pacing of development within a specific natural and cultural environment. This shortage of knowledge on the Indonesian child would turn up miseducation of the child. A new pedagogy is a need in Indonesia not through borrowing ideas from outside but through strengthening our research capacity at the School of Education and educational research institutions, and establishing a more symbiotic relationship between theory and practice of education. By so doing, pedagogy in Indonesia not only will improve the quality of education but also contribute to the development of educational sciences needed in the knowledge-based society in the era of globalization.

PENDAHULUAN

Ada baiknya kita simak tiga pengamatan dari dua orang Barat, seorang dari Inggris, seorang lagi Kepala Sekolah Internasional di Jakarta; dan seorang Indonesia mengenai pendidikan di Indonesia.

Daryl Forde adalah Kepala Sekolah dari suatu International School di Jakarta dan Ketua dari Association of

National Plus Schools. Dia mengatakan sebagai berikut: "Some of the leading national plus schools offer facilities and leading edge technology that is as good as (if not better) that most of the International School."[1]

Prof. John West-Burnham adalah seorang guru, pakar dari Inggris terutama di dalam hal *schools leadership* baru-baru ini berkunjung ke Jakarta untuk melihat aktivitas lembaga Sampoerna Foundation. Ketika kepadanya ditanyakan apakah ada suatu negara yang dapat diambil contoh oleh Indonesia sebagai model dalam menerapkan mutu pendidikannya dia memberikan jawaban sebagai berikut: "That does not exist any where in the world at the moment, and therefore rather than borrowing ideas, there is a need to invest time in building up a cultural identity of a democratic Islamic society with huge resources and potential. Than always put it through a filter '*does this work for Indonesia*' rather than having the sort of quasi- colonialism of importing foreign ideas. You pick and choose, but never say can we be like ... because the answer is you never can."[2]

Doni Koesoema A. dalam harian KOMPAS, 18 Juni 2007 berjudul "Ironi Pendidikan dari Trunyan"[3] menggambarkan kegagalan pendidikan dasar di desa Trunyan yang tidak didasarkan kepada kebutuhan budaya setempat sehingga tidak menghargai kearifan budaya adiluhung sehingga tidak bermanfaat atau mengubah kehidupan anak-anak Trunyan. Desa Trunyan seperti kita ketahui adalah desa yang diteliti oleh Prof. James Dananjaya, seorang ahli

---

[1] **KABAR INDONESIA,** Vol. II. Issue 13, 2007, hlm. 70.
[2] **Ibid,** hlm. 69.
[3] **KOMPAS,** 18 Juli 2007

antropolgi terkemuka Indonesia yang melihat desa itu sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang menyimpan berbagai kearifan lokal yang terus masih hidup sampai era globalisasi dewasa ini.

Dari ketiga episode di atas menunjukkan carut-marut pendidikan di Indonesia yang di satu pihak kehampaan ilmu pendidikan, di pihak lain dihinggapi eforia globalisasi yang menempatkan pendidikan nasional sebagai alat untuk persaingan global antara lain dengan munculnya seperti cendawan sekolah-sekolah nasional plus atau sekolah-sekolah internasional baik pada pendidikan usia dini sampai universitas. Di tengah-tengah keceriaan internasionalisasi pendidikan nasional Indonesia terdapat jutaan si Kadek yang menjadi korban sistem pendidikan nasional yang berorientasi urban bahkan dipersiapkan untuk bersaing[4] dalam forum internasional seperti berbagai bentuk olimpiade siswa.

Makalah ini mencoba membawa kita kepada refleksi praksis pendidikan yang didasarkan kepada konstruksi-konstruksi palsu dalam proses pendidikan anak Indonesia. Pertanyaan pokok yang muncul ialah bagaimana kita medekonstruksi praksis pendidikan dan ilmu pendidikan dewasa ini agar dapat membawa anak Indonesia dapat berdiri sendiri dan memilih dalam era globalisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi 1945.

---

[4] Lihat **RENSTRA** Departemen Pendidikan Nasional 2005–2009. "Pada tahun 2025, sistem Pendidikan Nasional berhasrat menghasilkan: Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif."

I. HAKEKAT ILMU PENDIDIKAN

a. Ilmu Sosial yang Interdisipliner

Si Kadek yang berumur 10 tahun dari desa Trunyan adalah gambaran seorang bocah Indonesia. Badannya kurus, meninggalkan bangku sekolah SD karena merasa sekolah tidak terjangkau baik dalam jarak maupun di dalam isi pendidikan sekolahnya. Himpitan ekonomi membawa dia menjadi penjual bawang bersama ibunya ke Denpasar. Rupa-rupanya si Kadek kekurangan gizi sehingga tidak kuat untuk berjalan menuju sekolahnya yang terletak jauh dari kampungnya. Sekolah dirasakan tidak bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup seorang anak desa. Di sini kita lihat kekurangan pengetahuan kita mengenai warisan budaya kita di desa Trunyan dan kearifan-kearifan lainnya yang masih tersembunyi di dalam masyarakat desa itu. Pengetahuan antropologi, sosiologi, ekonomi, kesehatan dan tentu juga hidup kerohanian desa Trunyan yang beragama Hindu ikut menentukan praksis pendidikan di desa itu.

Pendidikan si Kadek tidak terlepas pula dari kehidupan politik. Dia telah gagal untuk menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun yang pasti tidak dapat diberikan oleh daerahnya karena keputusan politik yang tidak memungkinkan alokasi dana yang mencukupi untuk desa Trunyan. Ternyata masalah pendidikan di desa Trunyan tidak terlepas dari tingkat kemiskinan yang dialami oleh penduduk desa. Pembangunan kita ternyata masih terlalu diorganisasikan kepada kebutuhan anak-anak perkotaan sebagaimana yang diberikan oleh sekolah-sekolah

plus yang berada di kota-kota. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar ternyata bukan hanya merupakan keputusan politik tetapi juga yang lebih penting ditopang oleh keputusan-keputusan ekonomi karena pelaksanaan wajib belajar tidak terlepas dari kemampuan ekonomi rakyat.[5] Negara kita masih tergolong negara sedang berkembang. Tingkat kemiskinan masih tinggi menurut perhitungan BPS (Biro Pusat Statistik) masih sekitar 37 juta rakyat miskin sedangkan menurut ukuran Bank Dunia masih sekitar 100 juta rakyat Indonesia tergolong miskin. Indeks pembangunan manusia (HDI) pada tahun 2006 Indonesia tergolong nomor 108 dari 177 negara di dunia.

Selain dari ilmu-ilmu penunjang tersebut di atas belum lagi kita memasuki ranah ilmu pendidikan itu sendiri. Sudah pasti si Kadek mengalami proses pendidikan berdasarkan ilmu pendidikan yang telah usang yang menekankan kepada pengembangan intelektualisme yang asing bagi kehidupan seorang anak desa. Saya kira nasib si Kadek dialami juga oleh anak-anak desa di seluruh Indonesia lainnya yang menjadi korban dari ilmu pendidikan yang melihat anak Indonesia bukan sebagai subyek tetapi sebagai obyek dari suatu sistem nasional yang tidak manusiawi. Dimanakah para pakar ilmu pendidikan Indonesia di LPTK itu bersembunyi sedangkan mereka telah diberikan kesempatan untuk menyimak masalah pendidikan dari berbagai jenis disiplin? Bukankah dengan perubahan IKIP menjadi universitas membuka kesempatan bagi disiplin lainnya untuk membantu

[5] Ceramah mantan Mendiknas, Prof. Yuwono Sudarsono di Universitas Pelita Harapan, 24 Juli 2007.

ilmu pendidikan mengembangkan paradigmanya yang membela hak-hak anak Indonesia?

b. Ilmu Pendidikan sebagai suatu Geisteswissenschaft

Di tengah-tengah perkembangan ilmu pendidikan yang ditunjang oleh disiplin-disiplin ilmu lainnya perlu dipegang karakteristik utama dari ilmu pendidikan sebagai suatu *geistesswissenschaft.* Ilmu pendidikan tidak perlu tenggelam di dalam apa yang disebut perang ilmu antara *geistesswissenschaft* dengan *naturewissenschaft* atau pandangan subyektif versus pandangan positvisme.[6] Sebagai suatu geistesswissenschaft ilmu pendidikan mampunyai dasar-dasar atau epistema[7] yang kokoh yaitu mengenai subyek anak Indonesia dalam masyarakat dan budaya Indonesia yang pluralistis. Pandangan lahir dari paham hermeneutika[8] dalam ilmu-ilmu sosial dengan metodenya yang khas yaitu metode "verstehen." Apabila ilmu pendidikan menggunakan metode "verstehen" di dalam menghayati obyeknya atau menggunakan metode tersebut di dalam riset maka bukan berarti ilmu pendidikan mengharamkan metode kuantitatif dalam pengembangan ilmunya.

Sebagai geistesswissenschaft, ilmu pendidikan tetap menggunakan epistema pendidikan *ketimbang* menggunakan epistema-epistema lainnya seperti epistema ekonomi, epistema psikologi, epistema politik dan epistema-epistema

---

[6] Lihat Thomas S. Popkewitz & Lynn Fendler (ed.), **Critical Theories in Education** (1999).

[7] Istilah dikemukakan oleh Michael Foucault yaitu suatu rezim kebenaran (regime of truth) yang mengarahkan suatu diskursus pembentukan suatu ilmu pengetahuan.

[8] Lihat Shaun Gallagher, **Hermeneutics and Education** (1992).

lainnya yang sekadar menjadi penunjang pelaksanaan praksis pendidikan. Masalah ini penting oleh karena di dalam menghayati proses pendidikan kita dapat jatuh kepada penggunaan epistema lainnya seperti epistema ekonomi di dalam mengukur kualitas proses pendidikan dari angka-angka kuantitatif atau pun tercapainya tujuan pendidikan yang memenuhi tuntutan kekuatan pasar seperti di dalam era globalisasi dewasa ini. Memang salah satu tujuan pendidikan adalah manusia Indonesia yang dapat berdiri sendiri secara ekonomis dan sosial namun yang lebih tinggi nilainya adalah manusia yang bermoral dan bertanggung jawab. Inilah tujuan etis dari pendidikan yang pasti bukan merupakan tujuan dari homo economicus.

II. PANDANGAN-PANDANGAN BARU DALAM ILMU PENDIDIKAN

Sebagaimana juga dengan ilmu-ilmu lainnya, ilmu pendidikan berkembang sangat cepat apalagi dalam era globalisasi dan dunia terbuka dewasa ini yang ditunjang oleh kemajuan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Di tengah-tengah perubahan yang serba cepat itu bukan berarti praksis pendidikan di dunia ini telah berubah.[9] Tentunya terdapat praksis pendidikan yang masih menggunakan paradigma-paradigma lama seakan-akan proses pendidikan sejak dahulu sampai sekarang tetap sama serta manusia juga tetap sama. Namun ilmu pendidikan yang berkenaan dengan perkembangan pribadi seseorang di dalam masyarakatnya

[9] Lihat: Manuel Castells cs (ed.), **Critical Education in the New Information Age** (1999).

yang berbudaya telah terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar.

a. Pedagogik Kritis dan Mazhab Frankfurt[10]

Salah satu pemikiran modern dalam pedagogik ialah apa yang disebut pedagogik kritis atau disebut juga pedagogik transformatif. Lahirnya pedagogik kritis tidak terlepas dari sekelompok filsuf, teoritikus sosial, serta kritikus budaya di Universitas Frankfurt pada tahun 1929 mendirikan Institute for Social Research. Sudah jelas pokok penelitian mazhab ini berpusat pada budaya. Kebudayaan dianggap sebagai entitas kreasi manusia yang sangat penting sebab di tengah-tengah budaya itulah seorang manusia dapat mengembangkan dirinya atau dipenjarakan di dalam budayanya sendiri. Mereka mengkaji keadaan masyarakat serta budaya pada waktu itu secara kritis dan menemukan berbagai konstruksi budaya yang lahir dari struktur kekuasaan seperti kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi. Demikian pula telah lahir berjenis-jenis budaya hasil konstruksi manusia serta hasil pemikiran manusia. Mereka antara lain menetang pendapat Hegel yang idealistis yang melihat kebudayaan sebagai hasil ciptaan ide absolut. Mereka melihat kenyataan kebudayaan sebagai suatu yang riil yang tampak dengan kasat mata serta terbentuk karena perjuangan kekuasaan di dalam masyarakat. Kelompok ini disebut pula kelompok Neomarxis.

Pandangan mazhab Frankfurt terhadap kebudayaan sebagai hasil konstruksi manusia dalam masyarakat berkelas, memasuki Inggris sesudang Perang Dunia II. Seperti kita

[10]Thomas S. Popkewitz, **op cit.**

ketahui kebudayaan Inggris membedakan antara budaya feodal yang dimiliki oleh kelas tertentu di dalam masyarakat dan budaya popular yang dimiliki oleh rakyat biasa khususnya oleh kaum pekerja. Budaya popular dianggap budaya yang kurang bergengsi dan budaya feodal adalah budaya yang memperkaya hidup manusia. Lahirlah apa yang disebut studi kultural di Universitas Birmingham dengan tokoh-tokohnya seperti Williams, Hoggart, Hall.

Pedagogik kritis melihat pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan. Demikian pula mereka melihat anak bukan suatu yang abstrak tapi suatu subyek yang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan kebudayaannya. Pedagogik kritis melihat anak serta masyarakat yang konkrit dan bukan hasil konstruksi. Kebudayaan adalah hasil konstruksi masyarakat dan anak yang konkrit hidup dan dibesarkan di dalam kebudayaan itu. Hal ini berlawanan dengan pendapat Rousseau dan Piaget yang melihat anak sebagai suatu subyek yang abstrak. Demikian pula gerakan "progressive education movement" dipelopori John Dewey di Amerika pada tahun 1920-an yang menekankan pada peranan masyarakat di dalam perkembangan anak ternyata juga telah mengabstrakkan subyek peserta-didik.

Studi kultural kemudian memasuki benua Amerika dan pertama-tama memasuki ilmu pendidikan.[11] Masuknya studi kultural di Amerika yang kemudian mempunyai spektrum yang lebih luas bukan hanya berkenaan dengan studi budaya atau studi bahasa tetapi telah memasuki semua ilmu-ilmu sosial.

---

[11] Lihat H.A.R. Tilaar, **Perubahan Sosial dan Pendidikan. Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia** (2002).

Terkenal konferensi studi kultural pertama di University of Illinois pada tahun 1990 yang memberikan warna tertentu atas studi kultural di lembaga-lembaga pendidikan tinggi Amerika. Hal ini mudah dimengerti karena politik diskriminasi ras yang masih hidup di dalam praktek kehidupan Amerika memberikan kedudukan inferior terhadap budaya yang bukan Barat atau budaya yang tidak berintikan WASP (White Anglo Saxon Protestant). Pandangan studi kultural ternyata sejalan dengan paham demokrasi yaitu bahwa semua manusia diciptakan sama dan oleh sebab itu kreasi manusia di dalam hidup bersama yaitu kebudayaannya mampunyai martabat yang sama. Studi kultural memberikan tempat yang sangat esensial terhadap pendidikan demokrasi. Sejalan dengan itu pula studi kultural memberikan tempat terhormat terhadap perjuangan hak asasi manusia.

Pedagogik kritis memberikan tempat yang sangat terhormat terhadap studi kultural karena melihat proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Pendidikan yang menghapuskan kebudayaan seperti di Indonesia dewasa ini akan jatuh kepada pendidikan tanpa tujuan etis tapi hanya sekadar diarahkan kepada mencapai pengembangan intelektual atau pengembangan otak kiri dan melecehkan perkembangan kreativitas serta nilai-nilai etika dan estetika dari manusia.

Pedagogik kritis memberikan arti yang sangat besar terhadap kesadaran manusia akan keberadaannya. Sistem pendidikan ortodoks telah mencoba mengaburkan atau menggelapkan kesadaran manusia akan hak-haknya oleh

kekuasaan politik, ideologi, kebudayaan yang berlaku di dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu Paulo Freire, Ivan Illich, menekankan kepada pentingnya membangkitkan kesadaran manusia akan keberadaannya agar supaya dia mengenal akan hak-haknya maupun kewajibannya untuk mengubah masyarakat.[12]

b. Konsep Tamansiswa dalam Konteks Modern

Tamansiswa dianggap sebagai pelopor pendidikan nasional. Sungguhpun "paguron" tersebut didirikan pada permulaan abad ke-20 namun demikian konsep-konsep yang dilahir-kannya yang merupakan landasan perguruan Tamansiswa tidak usang dalam perspektif ilmu pendidikan abad ke-21. Tentunya dengan adanya perbedaan konteks kehidupan ketika dilahirkan, dasar-dasar Tamansiswa perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Coba kita lihat beberapa dasar pemikiran tentang Tamansiswa itu.

Pandangan Tripusat pendidikan yang dimulai dengan keluarga kemudian semakin meluas menjadi lingkungan sekolah dan selanjutnya karena pada zaman kolonial penting peranan perkumpulan pemuda sebagai pusat yang ketiga di dalam pembentukan kepribadian peserta-didik. Tripusat pendidikan ini tidak membatasi proses pendidikan hanya di sekolah saja tetapi lebih luas lagi dilihat dari segi kebutuhan masyarakat. Pandangan Tripusat ini sejalan dengan pemikiran ilmu pendidikan modern dari Vygotsky atau pun Piaget dan

---

[12] Lihat Listiono Santoso dkk., **Epistemologi Kiri** (2006), hlm. 125–145. Paulo Freire menggunakan istilah conscientizacao. Lihat juga Williams A. Smith, **Conscientizacao. Tujuan Pendidikan Paulo Freire** (terjemahan 2001).

Habermas. Teori Vygotsky mengenai zona perkembangan proksimal melihat perkembangan peserta-didik merupakan perpaduan antara lingkungan dan kematangan fungsi otak peserta-didik. Piaget mengajarkan mengenai perlunya kesesuaian antara lingkungan yang memberikan rangsang terhadap perkembangan kemampuan otak peserta-didik. Habermas mengajarkan mengenai tindakan manusia yang inter-subyektif karena bertalian dengan interaksi terutama dengan sesama manusia di dalam masyarakat.[13]

Menurut Ki Hajar Dewantara fungsi guru adalah seorang pemimpin. Keberhasilan proses pendidikan terutama terletak kepada keberhasilan guru sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan guru dalam perkembangan peserta-didik beralih fungsi sesuai dengan kematangan perkembangan kepribadian peserta-didik. Ketika peserta-didik masih berada di dalam tahap pengembangan masa kanak-kanak maka fungsi guru adalah memberikan teladan (ing ngarso sung tulodo). Orang tua, guru, adalah seorang panutan dari peserta-didik. Peserta-didik akan meneladani orang tua atau pendidik dari tingkah-lakunya, integritas peribadinya, disiplin dalam sikap, cara bertindak dan berpikir dan bukan mengandalkan kepada kekuasaan tetapi didasarkan kepada sikap rasional dan demokratis. Ketika peserta-didik menjelang dewasa perkembangan kepribadiannya sudah semakin maju dalam hal berpikir, merasa dan melakukan sesuatu dengan tanggung jawab, maka pemimpin yang diidamkannya (orang tua, guru) adalah pemimpin yang mendampinginya. Pemimpin

---

[13] Lihat selanjutnya H.A.R. Tilaar, **Mengindonesia. Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia** (2007).

atau guru bukan mendikte dia tetapi memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk berinisiatif dengan bimbingan guru atau orang tua sehingga di dalam situasi-situasi di mana peserta-didik pun dapat mengambil keputusan sendiri maka dia akan dibantu secara sukarela dari guru atau pemimpinnya. Di dalam relasi ini tidak ada unsur paksaan atau perintah akan tetapi unsur motivasi yang diberikan oleh pemimpin kepada peserta-didiknya. Dengan demikian lama-kelamaan terbentuklah benih-benih kemandirian dan kepercayaan dari peserta-didik akan kemampuan dirinya sendiri. Inilah fungsi pemimpin "ing madyo mangun karso."

Ketika peserta-didik telah mulai melangkah ke kedewasaan maka fungsi guru atau pemimpin berubah menjadi seorang pemimpin yang mampu memberikan motivasi dan rasa percaya diri dari peserta-didik. Dengan demikian akan tumbuh kepribadian yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri untuk mengambil keputusan-keputusan moral sendiri dan berpartisipasi di dalam usaha-usaha bersama. Fungsi guru adalah berada di belakang peserta-didik dalam memberikan motivasi dalam kehidupan peserta-didik yang mandiri. Inilah fungsi "tut wuri handayani."[14]

Demikianlah suatu contoh teori ilmu pendidikan yang dapat kita gali dari kearifan lokal yang tersimpan di dalam kebudayaan kita. Tidak semua tradisi atau nilai-nilai kebudayaan kita yang ketinggalan zaman. Kekayaan kebudayaan di dalam bentuk local knowledge harus kita gali dan disesuaikan dengan kemajuan zaman. Prinsip Tut Wuri

---

[14] Lihat K.H. Dewantara, **Karya K.H. Dewantara. Bagian pertama: Pendidikan** (2004).

Handayani yang dijadikan motto dari Departemen Pendidikan Nasional sungguh sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokratis.

Sistem among (cuddle system) dari Tamansiswa yang bertujuan menyokong kodrat alam peserta-didik agar dapat mengembangkan kehidupannya lahir-batin menurut kodratnya masing-masing. Prinsip ini adalah prinsip yang dikemukakan oleh Paulo Freire tentang pentingnya menghidupkan kesadaran manusia agar supaya dia tidak terperangkap di dalam berbagai jenis kekuasaan yang memenjarakan perkembangan peserta-didik. Dengan kesadaran akan kodrat-nya peserta-didik dapat mengembangkan kemampuannya sendiri dan dapat melihat kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat baik yang menjadi pendorong maupun yang menjadi penghambat kebebasan manusia. Sistem among adalah sistem pemerdekaan manusia agar dia dapat berdiri sendiri. Kesadaran yang dikembangkan oleh peserta-didik dalam suatu lingkungan dapat berupa lingkungan alamiah, lingkungan masyarakat dan lingkungan kebudayaan di mana peserta-didik itu berada. Teori Pierre Bourdieu mengenai habitat seseorang yang merupakan lingkungan yang merangsang kehidupan pribadi seseorang telah tersedia di dalam lingkungan kebudayaan maupun lingkungan alamiah dan masyarakat. Adalah tugas manusia merdeka untuk memperluas habitatnya maupun di dalam merekonstruksi habitatnya yang baru sehingga dengan demikian kepribadi-annya semakin berkembang, kebudayaannya semakin diper-kaya dan lingkungannya semakin dapat dilestarikan ataupun dimanfaatkan untuk perkembangan peserta-didik. Demikian-

lah beberapa cuplikan dari dasar-dasar dan asas-asas Tamansiswa yang hampir berusia seabad itu. Adalah merupakan tugas dari ilmu pendidikan Indonesia modern untuk mengkaji kembali asas-asas pendidikan nasional tersebut yang disesuaikan dengan perubahan masyarakat lebih-lebih lagi di dalam perubahan global dewasa ini. Asas-asas Tamansiswa bukan merupakan suatu yang *verstard* (membeku) menurut istilah Ki Hajar Dewantara sehingga telah merupakan suatu kegiatan rutin yang otomatis tetapi yang perlu setiap saat disesuaikan dengan perubahan zaman. Saya melihat dewasa ini ilmu pendidikan di kalangan "paguron" Tamansiswa berada di dalam status quo bahkan mengalami kemunduruan karena perubahan zaman. Tafsiran-tafsiran ilmu pendidikan Tamansiswa masih menggunakan tafsiran-tafsiran kemajuan ilmu pengetahuan pendidikan permulaan abad ke-20.

III. PEDAGOGIK KRITIS DAN POSMODERNISME[15]

Dunia terbuka dewasa ini adalah dunia modern. Dalam sejarah umat manusia dunia modern telah dimulai ketika dunia melepaskan diri dari kungkungan berbagai jenis dogma yang mempertahankan status quo di dalam kehidupan manusia. Di dalam dunia Barat dikenal sebagai abad Aufklärung atau abad pencerahan akal. Abad pencerahan melahirkan modernisme. Paham modernisme apakah dalam bentuk modernisme sistemik atau modernisme kritis kedua-duanya mampunyai kesamaan yaitu mengupas realitas alam melalui akal manusia. Kemajuan budaya manusia akibat modernis sungguh dahsyat.

---

[15] Lihat pemikiran-pemikiran posmodernisme dalam pendidikan: Peter P. Trifonas (ed.), **Revolutionary Pedagogies. Cultural Politics, Instituting Education, and the Discourse of Theory** (2000).

Industrialisasi telah mengubah masyarakat yang statis menjadi dinamis tetapi seiring dengan itu pula timbul berbagai ekses seperti kolonialisme, imperialisme, Perang Dunia I dan yang terakhir Perang Dunia II. Muncullah pemikiran-pemikiran skeptis terhadap kemajuan akal manusia dalam bentuk posmodernisme. Posmodernisme (posmo) mempengaruhi kehidupan manusia abad 21. Meskipun sangat sulit untuk merumuskan apa sebenarnya posmodernisme itu, tetapi yang nyata ialah manusia dewasa ini mulai meragukan hasil-hasil dari prestasi akalnya sendiri. Inilah inti dari posmodernisme yang meragukan hasil-hasil yang dicapai oleh modernisme. Posmodernisme menyatakan perang terhadap modernisme. Manusia abad ke-21 bukan lagi hidup di dalam alam modern tetapi dalam budaya kontemporer yaitu kehidupan di dunia maya di dalam ruang cyber, kenyataan virtual (virtual reality) bahkan kita hidup di dalam suatu zaman akhir dari sejarah seperti pandangan Francis Fukuyama. Posmo menolak berbagai asumsi epistemologis yang disepakati oleh modernisme, demikian pula menolak berbagai konvensi metodologis yang diakui selama ini, posmo melawan berbagai trend ilmu pengetahuan yang menganut adanya kebenaran yang abadi. Sebaliknya posmo menganut berbagai versi kebenaran dan menolak berbagai rekomendasi kebijakan. Pada pokoknya posmo menolak berbagai asumsi yang sudah establish di dalam berbagai kehidupan manusia modern sampai-sampai mereka meragukan akan eksistensi adanya negara-bangsa akibat globalisasi. Posmo menantang pendapat adanya suatu pandangan dunia yang menyeluruh, yang global baik yang merupakan pandangan politis, agama

dan sosial. Mereka melihat dunia dewasa ini telah dipenjarakan oleh paham-paham seperti Marxisme, Kristianisme, Fascisme, Stalinisme, Kapitalisme, demokrasi liberal, humanisme sekuler, feminisme, ilmu pengetahuan modern, liberalisasi ekonomi. Semua hal ini disebut logo sentris yaitu suatu meta-narasi atau "grand narration" yang mengasumsikan adanya kemajuan di masa depan. Sayang sekali memang posmodernisme tidak menganjurkan suatu pemecahan atau alternatif baru terhadap tantang-tantangan yang dihadapi oleh manusia dewasa ini tetapi sekadar mengupas asumsi-asumsi yang mendasari narasi besar yang telah dikembangkan oleh modernisme.[16]

Bagaimanakah pengaruh posmodernisme terhadap ilmu pengetahuan? Posmo menolak pengotak-ngotakan hidup manusia oleh ilmu pengetahuan yang terkotak-kotak itu. Mereka menolak segala sesuatu yang kompleks, gaya hidup urban, kehidupan yang didominasi akal tetapi memberikan penekanan dan arti yang besar dalam kehidupan manusia yang alamiah, bukan kehidupan urban yang serba dangkal. Posmo memberikan arti yang besar terhadap kehidupan tradisional, kepada hal-hal yang sakral, partikular serta irasional. Hal-hal dahulu yang ditolak oleh modernisme seperti perasaan manusia, intuisi, spekulasi, pengalaman pribadi, kosmologi, magis, pengalaman-pengalaman mistis, semua hal tersebut mendapat perhatian posmodernis sebagai pengalaman manusia yang unik. Dengan demikian posmodernisme menentang penglihatan yang membatasi disiplin ilmu secara

---

[16] Lihat kritik terhadap teori pendidikan posmodernisme dalam H.A.R. Tilaar, **Manifesto Pendidikan Nasional. Tinjauan dari Perspektif Pstmodernisme dan Studi Kultural,** hlm. 46–58.

kaku antara lain perbedaan antara ilmu kealaman dan ilmu-ilmu kemanusiaan serta sosial termasuk seni dan literatur. Dengan demikian posmodernisme merobek-robek batas-batas disiplin, batas antara pendidikan dan politik, pendidikan dan ekonomi, pendidikan dan agama, pendidikan dan seni dan seterusnya. Dengan kata lain posmodernisme mampunyai sifat interdisipliner. Dengan demikian posmodernisme menolak berbagai hal yang bersifat konvensional, diskursus akademis yang linier tetapi lebih mementingkan kepada pencitraan atau simbol-simbol yang tergantung kepada interpretasi seseorang. Lyotard, salah seorang tokoh posmodernisme terkenal dengan pengertiannya tentang meta narasi. Menurut Lyotard ilmu pengetahuan dan tindakan dunia modern banyak mencari legitimasinya dalam narasi-narasi tertentu. Meta-narasi tersebut antara lain tradisi positivisme dan idealisme Jerman yang antara lain telah melahirkan Marxisme. Marxisme yang menjanjikan kemajuan serta emansipasi ternyata tidak dapat diwujudkan. Lyotard menganjurkan agar supaya ilmu pengetahuan mengkaji kembali narasi-narasi yang digunakan sebagai legitimasi pembenaran suatu pendapat. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Derrida mengenai paham logo sentris yaitu prinsip metafisik yang didengung-dengungkan di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut perlu didekonstruksikan sehingga dapat ditemukan kembali logos dari suatu pengertian. Inilah prinsip diskursus yang dianjurkannya untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Michael Foucault menyatakan mengenai perlunya diadakan kajian genealogis dari suatu konsep karena konsep-konsep tersebut terkait dengan struktur kekuasaan yang hidup di dalam masyarakat.

Dari ketiga pemikir posmodernisme tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kebenaran universal seperti yang diklaim oleh filsuf-filsuf metafisika sebenarnya tidak ada. Demikian pula kebenaran abadi serta adanya satu metode dalam mencapai kebenaran yaitu metode rasionalitas ditolak.

Ilmu pendidikan banyak berdiri di atas narasi besar atau logos-logos yang perlu dipertanyakan. Untuk mencapai hal tersebut ilmu pendidikan harus berani mendekonstruksi berbagai pengertian dan prinsip di dalam berbagai proses pendidikan. Salah satu hal yang perlu dicermati ialah proses pendidikan yang dijalankan di bumi Indonesia dewasa ini berdasar kepada pemikiran Barat yang belum tentu berlaku untuk anak Indonesia. Oleh sebab itu penelitian mengenai keberadaan anak Indonesia yaitu pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan cara berpikir dan cara bertindak di dalam masyarakat yang plural perlu digalakkan untuk memperoleh suatu ilmu pendidikan anak Indonesia.

Pandangan posmodernisme di dalam ilmu pendidikan masih relatif sangat baru.[17] Menyadari akan kekuatan serta kelemahan posmodernisme ada baiknya apabila kita manfaatkan dalam pengembangan ilmu pendidikan yang berawal dari kondisi masyarakat dan sosial budaya Indonesia.

b. Neoliberalisme dan Komersialisasi Pendidikan

Salah satu anak emas modernisme ialah liberalisme yang berkembang sejak abad ke-18 di dunia Barat. Paham liberal ini muncul lebih pesat lagi dalam era globalisasi dewasa ini. Kebebasan individu yang hampir-hampir tak terbatas telah

[17] **Ibid**, hlm. 41. Simak juga penelitian-penelitian Arthur Berger (2003), David Lyon (2005) Hans Bertens (1996) tentang lahirnya Posmodernisme.

melahirkan masyarakat industri yang melahirkan budaya konsumerisme. Budaya ini juga telah memasuki dunia pendidikan. Pendidikan telah dijadikan sebagai komoditi perdagangan yang tunduk pada kekuatan pasar. Komersialisasi pendidikan kita lihat sedang merajalela di Indonesia dewasa ini sejak pendidikan taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Salah satu bahaya dari komersialisasi pendidikan ialah ungkapan yang menyatakan: **Orang miskin dilarang sekolah!** (Eko Prasetyo). Menghadapi gejala komersialisasi pendidikan ada baiknya apabila kita medekonstruksi paradigma-paradigma yang telah digunakan untuk mengarahkan pendidikan nasional. Penyelenggaraan ujian nasional (UN) yang menyepelekan wewenang guru, pemaksaan pendidikan menjadi Badan Hukum yang berkedok memberikan otonomi pendidikan tetapi sebenarnya menghilangkan tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan. Hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945 serta kenyataan bahwa masyarakat Indonesia masih tergolong masyarakat miskin.

IV. ILMU PENDIDIKAN DI INDONESIA DEWASA INI

Apabila kita simak secara jujur keadaan pendidikan nasional dewasa ini tampak dengan kasat mata bagaimana politik pendidikan didasarkan kepada non-ilmu pendidikan. Lihat saja argumentasi yang terjadi mengenai pelaksanaan UN, pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, tuntutan guru-guru dalam bentuk demonstrasi besar-besaran di Jakarta (Juli 2007), seluruhnya menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di dalam politik pendidikan nasional. Di satu pihak misalnya UU

No. 14 Tahun 2005 menuntut guru profesional, tetapi di lain pihak kita lihat pendidikan nasional dikelola oleh birokrasi yang tidak profesional.[18] Tantangan apa yang dihadapi mengenai carut-marut pendidikan nasional dewasa ini? Barangkali juga hal ini kelemahannya terletak di dalam diri kita sendiri yaitu tidak cukup amunisi secara profesional untuk menghadang kekuatan-kekuatan yang non-profesional melanda dunia pendidikan. Ilmu pendidikan di Indonesia ternyata kurang berkembang sehingga menghasilkan profesi guru yang lemah.

a. Ilmu Pendidikan yang Merana Karena Kekurangan Gizi

Sudah kita lihat ilmu pendidikan sebagai ilmu sosial yang praksis. Ini artinya ilmu pendidikan berkembang karena refleksi terhadap praksis pendidikan di alam Indonesia. Yang terjadi dewasa ini ialah praksis pendidikan didasarkan kepada teori-teori dari Barat yang perlu didekonstruksi dan dipertanyakan validitasnya dalam masyarakat dan budaya Indonesia yang plural. Oleh sebab tidak adanya refleksi terhadap praksis pendidikan maka tidak mengherankan apabila dunia pendidikan di Indonesia dilanda dan dihanyutkan oleh pemikiran-pemikiran non-pendidikan yang dominan dewasa ini yaitu pendidikan sebagai komoditi ekonomi.[19]

b. Anak Indonesia sebagai Titik-tolak

Apakah titik-tolak dari ilmu pendidikan di Indonesia? Sudah jelas titik-tolak ilmu pendidikan di Indonesia bukanlah "yaki" atau "wolai" (sejenis monyet hitam tanpa ekor di Minahasa)

---

[18] Saran ini penulis kemukakan pada Dewan Petimbangan Presiden, 7 Juni 2007.

[19] Pokok-pokok ceramah penulis dengan forum Kepala Sekolah se-DKI Jakarta, diselenggarakan oleh Universitas Bina Nusantara, 7 Agustus 2007.

atau tarsius spectrum (monyet terkecil di dunia) atau pun anak Jean Piaget yang merupakan obyek penelitian Jean Piaget yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan tentang perkembangan anak yang mendunia sampai ke Indonesia. Titik-tolak ilmu pendidikan di Indonesia ialah kehidupan anak Indonesia dalam masyarakat dan budaya Indonesia yang pluralis. Penelitian-penelitian dalam arti refleksi terhadap praksis pendidikan dari anak Indonesia dalam habitusnya yang beranekaragam perlu digalakkan dan dikembangkan. Hanya dengan demikian dapat lahir ilmu pendidikan Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak Indonesia. Selanjutnya karena anak Indonesia dewasa ini hidup di dalam dunia yang terbuka maka dimensi-dimensi global yang mempengaruhi perkembangan anak Indonesia perlu juga diteliti.

c. Hubungan Teori–Praktek–LPTK

Telah kita lihat ilmu pendidikan di Indonesia dewasa ini dalam keadaan merana karena kekurangan gizi. Sebagai ilmu sosial praksis ilmu pendidikan di Indonesia tidak cukup mendapatkan gizi dari proses pendidikan anak Indonesia. Kritik Prof. David Hargreaves mengenai lemahnya pertumbuhan ilmu pendidikan disebabkan karena ilmu pendidikan telah mengabaikan praksis pendidikan.[20] Gambar 1 di bawah ini menunjukkan hubungan antara teori pendidikan, praktek pendidikan dan LPTK.

---

[20] Lihat ulasan tentang kritik Prof. David Hargreaves, guru besar Universitas Cambridge tentang lemahnya hubungan antara teori dan praksis pendidikan dalam Martyn Hammersly, **Educational Research, Policymaking and Practice,** Chapter 1, hlm. 14–37. Lihat juga tulisan Conny R. Semiawan tentang AR dan CAR dalam **Catatan Kecil,** hlm. 149–180.

Gambar 1. **Teori Pendidikan, Praktek Pendidikan dan LPTK**

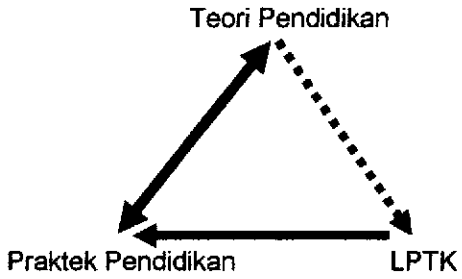

Dalam gambar di atas terlihat dengan jelas betapa ilmu pendidikan tidak terlepas dari praktek pendidikan. Bagaimanakah hubungan antara ilmu pendidikan dengan LPTK? Ternyata antara ilmu pendidikan dan LPTK dapat berjalan tanpa praktek pendidikan.[21] Inilah yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Akibatnya ialah ilmu pendidikan berdasarkan konstruksi-konstruksi asing atau paradigma yang tidak cocok dengan kebutuhan anak Indonesia. Selanjutnya karena output LPTK tidak mengenai realitas pendidikan di Indonesia maka dunia pendidikan Indonesia tidak perlu dikembangkan oleh tenaga-tenaga (birokrasi) profesional. Paradigma yang dihasilkan oleh LPTK menggunakan paradigma-paradigma hasil lamunan atau pinjaman atau konstruksi yang sangat idealistik yang pada keseluruhannya merupakan penipuan terhadap peserta-didik. LPTK seharusnya mampunyai hubungan yang simbiotik dengan ilmu pendidikan yang berdasarkan praksis pendidikan. Penelitian-penelitian tindakan (action research) atau penelitian tindakan kelas (class action research) dapat merupakan titik-tolak dari pengembangan ilmu pendidikan di Indonesia. Tugas tersebut tidak hanya terbatas dilaksanakan

---

[21] Lihat Michael Uljens, **School Didactics and Learning,** hlm. 18–21.

oleh LPTK tetapi juga oleh lembaga-lembaga riset pendidikan di Indonesia termasuk oleh guru kelas, kepala sekolah dan pelaku-pelaku pendidikan lainnya. Selain daripada itu perlu dikembangkan konsep-konsep yang mendasar mengenai pendidikan Indonesia dikaitkan dengan struktur kekuasaan, pengembangan ekonomi khususnya ekonomi pedesaan dan koperasi, praksis pendidikan yang berakar pada "local wisdom" yang ada di dalam kebudayaan yang pluralistik di Nusantara ini. Apabila hal ini dapat kita laksanakan maka itu juga berarti kita memberikan dimensi global terhadap ilmu pendidikan karena akan memberikan sumbangan di dalam perkembangan ilmu pendidikan secara universal. Keunggulan ilmu pendidikan Indonesia bukan berarti dapat bersaing dengan ilmu pendidikan di belahan dunia lainnya tetapi ilmu pendidikan yang menyumbangkan hal-hal yang unik dan spesifik mengenai perkembangan anak Indonesia yang akan dijadikan referensi global dalam pengembangan ilmu pendidikan itu.

V. MENGEMBANGKAN ILMU PENDIDIKAN DI INDONESIA YANG BERDIMENSI GLOBAL

Apabila kita cermati dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini tampak gejala-gejala yang keliru mengenai apa arti globalisasi. Globalisasi telah diartikan sebagai arena persaingan dalam dunia global. Lahirlah berbagai jenis program pendidikan internasional, sekolah plus, pendidikan model yang hampir seluruhnya mengambil acuan negara Barat. Menghadapi *trend* yang negatif tersebut apakah yang dapat kita laksanakan dalam menjaga eksistensi negara-bangsa Indonesia melalui ilmu pendidikan? Inilah beberapa

usul mengenai upaya kita menjaga anak Indonesia dari hempasan globalisasi yang kosong.[22]

a. Arti Pendidikan Bermutu bagi Anak Indonesia

Kita semuanya mendambakan semua anak Indonesia dapat menikmati pendidikan yang bermutu. Apakah artinya pendidikan yang bermutu bagi anak Indonesia? Jelaslah pendidikan bermutu bukannya kita sibuk bagaimana mempersiapkan perolehan medali emas di dalam ajang olimpiade fisika, olimpiade matematika, dan bersaing dengan anak-anak dari seluruh dunia. Pendidikan yang bermutu bagi anak Indonesia ialah apabila pendidikan itu dapat membawa kepada setiap anak Indonesia dapat mengangkat dirinya dari kemiskinan ilmu pengetahuan dan kemiskinan ekonomi. Dengan mutu pendidikan demikian dia dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi bangsanya dan bagi dunia global. Dengan demikian Indonesia dapat memenuhi "millennium development goals" yang telah disepakati oleh PBB. Selain itu kebijakan pendidikan nasional dengan pendidikan yang bermutu internasional yang pada saat ini hanya dapat dinikmati oleh segelintir anak Indonesia diubah menjadi pendidikan bermutu untuk semua anak Indonesia misalnya melalui pemenuhan janji konstitusional dengan biaya pendidikan yang memadai.

b. Riset Interdisipliner Anak Indonesia dan Globalisasi

Dalam rangka untuk membangun ilmu pendidikan yang bernas diperlukan penelitian interdisipliner mengenai anak

---

[22] Lihat: Nicholas C. Burbules & Carlos A. torres (ed.), 2000. **Globalization and Education. Critical Perspectives.** Khusus tulisan Fazal Rizvi, "International Education and the Production of global Imagination," hlm. 205 – 225. Lihat juga pandangan George Ritzer yang kritis dalam bukunya **Globalization for Nothing** (2003).

Indonesia. Penelitian mengenai perkembangan anak Indonesia bukan hanya monopoli dari ilmu pendidikan dalam arti sempit tetapi harus merupakan garapan dari berbagai ilmu pengetahuan mengenai perkembangan anak Indonesia seperti kaitan antara ekonomi dan kemampuan pendidikan (ekonomi pendidikan), kaitan antara politik dan pendidikan, praksis pendidikan yang didasarkan kepada kondisi sosial dan budaya yang beranekaragam dalam masyarakat Indonesia. Pengetahuan mengenai perkembangan anak Indonesia hendaknya berasal dari penelitian mengenai berbagai aspek kehidupan anak Indonesia. Hasil-hasil penelitian tersebut hanya dapat dilaksanakan di dalam lembaga-lembaga penelitian. Lembaga-lembaga penelitian tersebut dapat berdiri bukan hanya di LPTK tetapi juga di dalam lingkungan universitas dan lembaga-lembaga riset independen. Hasil-hasil penelitian dan refleksi mengenai proses pendidikan anak Indonesia kemudian dimuat di dalam berbagai jurnal ilmu pengetahuan khususnya jurnal ilmu pendidikan. Jurnal ilmu pendidikan yang ada dewasa ini kita akui belum memadai baik di dalam aspek mutunya maupun kuantitasnya. Akan datang suatu masa ketika penelitian-penelitian mengenai pendidikan anak Indonesia yang disebarluaskan melalui jurnal pendidikan menjadi bahan referensi dari ilmu pendidikan pada tataran global.[23] Inilah salah satu dimensi global dari ilmu pendidikan di Indonesia.

c. Dekonstruksi LPTK

Ketika pada awal abad ke-21 LPTK mengalami metamorfosa menjadi universitas, hal tersebut dianggap sebagai "necessary

[23] Lihat gagasan Douglas Kellner, "Globalization and New Social Movements: Lessons for Critical Theory and Pedagogy," dalam Nicholas C. Burbules, **Ibid**, hlm. 299–321.

evil." Penulis sendiri merupakan salah satu *proponent* dari metamorfosa itu. *Pertama*, mengapa proses metamorfosis tersebut merupakan suatu yang niscaya (necessary)? Dan *kedua*, mengapa proses metamorfosis tersebut dianggap sebagai suatu tindakan kriminal (evil)? Mari kita lihat jawaban dari kedua pertanyaan ini.

Profesi guru di seluruh dunia juga di Indonesia pada saat itu berada di dalam masa krisis. Profesi guru termasuk profesi yang tidak disukai karena renumerasinya yang rendah. Akibatnya ialah memasuki program keguruan tidak diminati dan ini ditunjukkan oleh semakin kecilnya mahasiswa yang memasuki IKIP. Atau yang memasuki pendidikan pada lembaga tersebut hanyalah suatu kebetulan atau kecelakaan. Oleh sebab itu menjadikan IKIP menjadi Universitas merupakan suatu keberuntungan. Selain itu menurunnya minat masyarakat terhadap pendidikan guru juga telah melunturkan perhatian pemerintah terhadap pembinaan LPTK pada waktu itu. Akibat selanjutnya ialah LTPK semakin merana dan dalam kondisi "hidup segan mati tak mau."

Metamorfosa IKIP menjadi universitas mampunyai nilai positif yang tidak banyak dilihat orang. Di sini terbuka peluang untuk mengadakan pendekatan interdisipliner terhadap ilmu pendidikan.[24] Hal ini dimungkinkan karena pada tataran universitas dapat tersedia berbagai jenis pakar yang dapat meneliti mengenai berbagai aspek perkembangan anak Indonesia. Kini dalam lingkungan universitas, LPTK mendapat

---

[24] Penulis sendiri ketika menjadi mahasiswa University of Chicago mendapat kuliah-kuliah antara lain dari guru besar fakultas biologi (Prof. Schwab), fakultas ekonomi (Prof. Schultz, laureate Nobel Ekonomi), fakultas sosiologi (Prof. Arnold Anderson).

kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pendidikan dengan lebih intensif. Masalahnya sekarang ialah belum banyak LPTK yang mampunyai dan mengembangkan lembaga penelitian dalam lingkungan universitasnya. Dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 mudah-mudahan perhatian terhadap penelitian anak Indonesia dalam lingkungan universitas dan khususnya LPTK akan semakin marak asal saja kesempatan yang terbuka ini digapai oleh LPTK dan bukan hanya sibuk dengan aktivitasnya yang rutin.

d. Peran Organisasi Profesi

Organisasi profesi sangat menentukan di dalam tumbuhnya ilmu pendidikan. Kebijakan pendidikan dewasa ini tidak didukung oleh hasil penelitian yang kuat. BSNP tidak di-*support* oleh hasil-hasil riset meskipun baru-baru ini dinyatakan oleh Mendiknas bahwa semua kebijakan pendidikan dewasa ini didukung oleh hasil-hasil riset (sic!) Organisasi profesi sudah pada waktunya mengembangkan kemampuan risetnya karena mereka sebenarnya menguasai habitat terjadinya proses pendidikan serta memiliki tenaga-tenaga profesional. Hal ini mungkin terjadi apabila tuntutan kesejahteraan minimal guru sudah dapat terpenuhi sehingga korps guru dapat memusatkan perhatiannya pada peningkatan kemampuan profesinya. Dewasa ini perjuangan guru masih tersita pada perbaikan hidup wajar dengan gerakan unjuk rasa sebagai hak asasi guru sebagai "pekerja intelektual" (intellectual workers) menurut istilah Michael Apple. Demo guru baru-baru ini adalah wajar diperhatikan oleh pemerintah secara lebih serius.[25]

---

[25] Daoed Joesoef, "Mempertaruhkan Masa Depan," **KOMPAS**, 25 Juli 2007.

VI. HARAPAN DI MASA DEPAN

Sudah kita lihat peta permasalahan pengembangan ilmu pendidikan di Indonesia dewasa ini dan masa depan. Pengalaman penulis dalam mengikuti beberapa pertemuan ilmiah FIP/JIP agaknya masih terbatas sebagai pertemuan kangen-kangenan atau sekadar pertemuan seremonial sehingga tidak ada greget dalam memajukan ilmu pendidikan. Seharusnya pertemuan ilmiah seperti ini ini telah dikaji dan dirumuskan secara rinci topik yang akan dibahas untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang secara berkesinambungan seperti yang kita lihat dalam laporan-laporan National Society for the Study of Education (NSSE Yearbook) yang diterbitkan setiap tahun sejak akhir abad 19.

Penulis mengusulkan beberapa topik yang dapat dijadikan pokok bahasan pertemuan FIP/JIP yang akan datang:

1. Revitalisasi FIP/JIP dalam meningkatkan Ilmu Pendidikan serta Ilmu Pendidikan yang diperlukan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru.
2. Dampak Globalisasi dan Pengembangan Ilmu Pendidikan di Indonesia.
3. Pendidikan Multikultural dalam Masyarakat Indonesia Pluralistik.
4. Kebijakan Pendidikan Nasional dengan Epistema Pedagogik.

Referensi

Anderson, Lesly & Nigel Bennett (ed.). 2003. **Developing Educational Leadership. Using Evidence for Policy and Practice.** Sage, London.

Burbules, Nicholas C. & Carlos Alberto Torres (ed.). 2000. **Globalization and Education. Critical Perspectives.** Routledge, New York.

Charner-Laird, Megin; Morgaen L. Donaldson; Soo Hong (ed.). **Educational Past and Present. Reflections on Research, Policy, and Practice.** Harvard Educational Review 75th Anniversary Issue, Vol. 75, No. 1, 2005.

Dewantara K.H. 2004 (cetakan ketiga). **Karya K.H. Dewantara. Bagian pertama: Pendidikan.** Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta.

Freire, Paulo. 1985. **The Politics of Education. Culture, Power and Liberation.** Bergin & Garvey. Westport, Connecticut.

Gallagher, Shaun. 1992. **Hermeneutics and Education.** State University of New York Press, Albany.

Grant, Carl A. & Joy L. Lei. 2001. **Global Constructions of Multicultural Education. Theories and Realities.** Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.

Hammersley, Martyn. 2002. **Educational Research, Policymaking and Practice.** Paul Chapman, London.

Joesoef, Daoed. "Mempertaruhkan Masa Depan." **KOMPAS,** 25 Juli 2007.

Kanpol, Barry. 1996. **Towards a Theory and Practice of Teacher culture Politics: Continuing the Postmodern Debate.** Ablex Publishing Corporation, New Jersey.

Lawn, Martin. 1996. **Modern Times? Work, Professionalism and Citizenship in Teaching.** Falmer Press, London.

Morrow, Raymond Allan; Carlos Alberto Torres (ed.). 1995. **Social Theory and Education. A Critique of Theories of Social and Cultural Reproduction.** State University of New York Press, Albany.

Prasetyo, Eko. 2005. **Orang Miskin Dilarang Sekolah.** Resist Book, Yogyakarta.

Reed, Ronald F. & Tony W. Johnson (ed.). 2000. **Philosophical Documents in Education.** Longman, New York.

Santoso, Listyono dkk. 2006. **Epistemologi Kiri.** Ar-ruzz, Yogyakarta.

Semiawan, Conny R. 2007. **Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.** Kencana Prenada Grup, Jakarta.

Shimahara, N. Ken; Ivan Z. Holowinsky; Saundra Tomlinson-Clarke (editors). 2001. **Ethnicity, Race, and Nationality in Education. A Global Perspective.** Lawrence Erlbaum Associates Publisher, New Jersey.

Smith, Williams A. 2001. **Conscienticao. Tujuan Pendidikan Paulo Freire** (terjemahan). Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Teitel, Lee. 2003. **The Professional Development Schools handbook.** Corwin Press, Thousand Oaks.

Tilaar, H.A.R. 2002. **Perubahan Sosial dan Pendidikan. Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia.** Gramedia, Jakarta.

Tilaar, H.A.R. 2004. **Multikulturalisme. Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Tranformasi Pendidikan Nasional.** Gramedia, Jakarta.

Tilaar, H.A.R. 2005. **Manifesto Pendidikan Nasional. Tinjauan dari Perspektif Posmodernisme dan Studi Kultural.** Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta.

Tilaar, H.A.R. 2007. **On Becoming Indonesia. Ethnicity and National Identity. A Pedagogical Perspective.** Institute of Management, State University of Jakarta (Indonesian verse published by RINEKA CIPTA, Jakarta, Oct. 2007).

Uljens, Michael. 1997. **Schools Didactics and Learning.** Psychology Press, Sussex.

KOMPAS, RABU, 18 JULI 2007

Ironi Pendidikan dari Trunyan

Oleh Doni Koesoema A.

Bagi banyak siswa, ujian nasional sekolah dasar tidak ada artinya. Ada atau tidak ada ujian nasional mereka tetap *drop out* dari SD. Wacana program wajib belajar sembilan tahun hanya mimpi bagi banyak anak Indonesia.

Kadek (10) terlihat lelap di antara barang dan penumpang dalam mobil Colt penuh sesak yang melaju dari Bangli ke Batubulan. Wajah gadis kecil dengan rambut dikepang dua itu terlihat lelah dan gerah dengan jaket jins motif bunga. Ibunya, Ketut Puri (40), seorang warga dari perbukitan atas di Banjar Madya Trunyan, Kintamani, Bali, mengajaknya berjualan bawang merah di Denpasar. Kadek adalah ironi pendidikan yang datang dari Desa Trunyan. Mengapa?

"Dia sudah tidak sekolah lagi. Hanya sampai kelas III SD. Setelah itu ia tidak mau sekolah lagi. Capek, katanya," kata Ketut Puri tentang anaknya.

Kadek tidak mau sekolah bukan karena tak memiliki minat untuk belajar. Ia tidak mau pergi ke sekolah karena tubuh fisiknya yang kecil dan lemah itu tidak kuat jika setiap hari harus naik-turun gunung dari desanya di Banjar Madya Trunyan untuk pergi ke Trunyan, tempat satu-satunya sekolah dasar. Meskin SD di desa tersebut telah digratiskan, minat belajar menjadi kendur karena tantangan alam.

Namun, bukan hanya karena tantangan alam anak-anak di Desa Trunyan enggan bersekolah. Minimnya prasarana pendidikan, seperti alat transportasi dan jalan yang memadai, kurangnya sarana pendidikan, dan disertai kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat sebagian besar anak-anak di Desa Trunyan hanya mengenyam pendidikan sampai SD.

Di Dea Trunyan belum ada sekolah menengah pertama (SMP). Kalau mau melanjutkan SMP, mereka harus pergi ke Bangli. Kondisi ekonomi yang pas-pasan tidak memungkinkan anak-anak Desa Trunyan melanjutkan pendidikan dasar mereka sampai tuntas.

Bagi anak-anak Trunyan, diskursus tentang ujian nasional sekolah dasar (UN SD) tidak akan ada artinya. Ada atau tidak ada UN mereka tetap *drop out* dari SD. Wacana program wajib belajar sembilan tahun pun menjadi mimpi bagi masa depan anak di tepian Danau Batur ini. Kadek dan kawan-kawannya adalah gambaran rakyat yang hak-hak konstitusionalnya tentang pendidikan tidak dipenuhi oleh negara.

Sebagai sebuah kebijakan politik, kemunduran pendidikan di Trunyan bukan sebuah hal yang kebetulan. Situasi itu ada karena kebijakan pendidikan yang emoh rakyat dan abai terhadap kekayaan budaya daerah, termasuk di dalamnya pengembangan daya-daya manusiawinya.

Ironi Pendidikan

Desa Trunyan menyisakan ironi pendidikan. Situasi pendidikan di Trunyan menjadi tanda paling jelas tentang kebijakan pendidikan yang tidak disertai visi pengembangan budaya dan penghargaan atas kearifan lokal.

Bahasa kuno Bali, misalnya, tidak lagi diajarkan di sekolah. Hanya bbrp orang yang masih bisa berbicara bahasa Bali Kuno, sedangkan generasi mudanya hampir kehilangan tongkat estafet warisan budaya ini.

Trunyan juga terkenal sebagai obyek wisata bagi para turis domestik dan asing. Tradisi pemakaman di Trunyan yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun, warga Desa Trunyan, yang konon telah ada sebelum kedatangan Majapahit pada abad 14, hingga kini tetap menjadi sekadar obyek, entah obyek wisata ataupun obyek penelitian. Obyektivasi seperti ini alih-alih memperkaya kearifan lokal dan memberdayakan masyarakat setempat, malah menjadikan mereka tetap miskin dan tak berdaya. Mereka terpinggirkan di tengah arus promosi wisata. Di tengah gencarnya apresiasi wisatawan atas kekayaan budaya lokalnya, mereka malah terpuruk tak berdaya.

Pendidikan sebagai pembudayaan

Jika pendidikan adalah sebuah proses pemanusiaan dan pembudayaan sebagaimana diindikasikan oleh Driyarkara, fenomena pendidikan dari Trunyan adalah bukti nyata kebijakan politik pendidikan yang tidak disertai visi pemberdayaan msya lokal.

Mendidik supaya semakin berbudaya adalah menjadikan manusia semakin menjadi subyek yang bertanggung jawab atas hidup dan masyarakatnya, termasuk di dalamnya perawatan harta kekayaan kebudayaan yang terwariskan dari generasi sebelumnya. Jika manusia terdidik itu menjadi subyek, ia tidak akan terpaku pada kejayaan budaya pada masa lalu yang sekarang sesungguhnya telah tiada.

Nilai-nilai budaya itu semestinya memperkaya dan mencerahkan masyarakat lokal sehingga mereka menjadi subyek otonom yang mampu menjaga kelestarian budayanya. Jika tidak, mekajuan budaya Trunyan pada lampau akan kian tenggelam. Pewarisan budaya akan mandek karena jalur rantai tradisi pewarisan kekayaan budaya itu terputus oleh kebodohan. Masyarakat Trunyan akan tinggal sekadar sejarah kajayaan masa lalu jika warga keturunan dewa itu tidak tersentuh pendidikan yang mereka butuhkan.

Sebagai kebijakan politik, situasi pendidikan yang terjadi di Trunyan bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah hasil dari sebuah kedangkalan visi politik pendidikan yang menempatkan warga Trunyan sekadar sebagai obyek. Pendangkalan ini tampak dari tidak terurusnya sarana pendidikan, tiadanya perbaikan sarana tranportasi, serta hilangnya kreativitas pedagogis bagi kelangsungan pendidikan anak-anak Trunyan di atas perbukitan yang terpencil.

Alam memang perkasa, bahkan bisa mematahkan semangat manusia dalam mengatasi diri dan kekurangannya. Namun, justru melalui pendidikan, manusia membangun dirinya mengatasi keterbatasan alam. Alam selalu lebih besar dari manusia. Namun, manusia lebih luhur dibandingkan alam yang bisa sekejap memusnahkannya sebab manusia sadar akan kelemahannya, sedangkan alam tidak tahu apa-apa, demikian tulis Blaise Pascal.

Justru karena sadar akan kelemahannya, manusia membutuhkan pendidikan. Ironi pendidikan di Trunyan tidak perlu terjadi jika kebijakan politik pendidikan yang diterapkan peka terhadap kekayaan budaya lokal. Anak-anak di Trunyan tidak memerlukan masa orientasi sekolah yang hiruk hiruk-pikuknya baru saja dialami para pelajar di negeri ini. Yang mereka butuhkan adalah kebijakan politik pendidikan pemerintah yang berorientasi pada kultur setempat, menghargai kekayaan budaya lokal, sebuah kebijakan pendidikan yang memungkinkan tiap pribadi yang menjadi ahli waris budaya *adiluhung* itu bertumbuh kian bermartabat.

Jika kebijakan ini tidak ada, anak-anak Desa Trunyan hanya akan menjadi seperti Kadek, yang tertidur lelap, tidak bisa baca-tulis, hanya bisa menemani ibunya berjualan bawang merah, entah sampai kapan. Inilah ironi pendidikan dari Trunyan.

DONI KOESOEMA A
Penulis adalah Moderator SMA Gonzaga, Jakarta.